BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat tiga tahap pemberontakan, yaitu: pemberontakan (*rebellion*), *Insurgency*, dan *belligerency*. Baik itu pemberontakan, *insurgency* ataupun *belligerency*, ketiganya dipandang harus tunduk terhadap hukum dan kebiasaan perang. Pemberontakan (*rebellion*) merupakan gangguan sipil atau *civil disorder* yang menjadi yurisdiksi domestik. Sementara itu *Insurgency* termasuk pada bagian perang sipil atau *civil war*, yang dalam keadaan tertentu yaitu bila Pemberontak telah mengambil proporsi sedemikian rupa sehingga negara lain tidak mungkin lagi menutup mata terhadap kejadian tersebut terpaksa negara-negara memberikan perhatian mereka maka lahirlah pengakuan *insurgency* yang dapat menjadi yurisdiksi hukum internasional. Adapun *Belligerency* selain termasuk perang sipil juga menjadi yurisdiksi hukum internasional. Hukum Internasional terkait kriteria yang harus dipenuhi dalam pemberontakan untuk dapat menjadi *Belligerency* sebagai subjek hukum internasional dapat ditemukan dalam beberapa aturan; Pengaturan persyaratan atau kriteria *Belligerent* berdasarkan Konvensi Jenewa, dan Konvensi Hague, adalah sebagai berikut:

- a. Menguasai secara *de facto* suatu wilayah secara efektif;
- b. Memiliki lambang yang tetap dan khas;
- c. Memiliki struktur kekuasaan;
- d. Memiliki kekuatan persenjataan secara terbuka;
- e. Mengklaim dirinya *Belligerent*; dan
- f. Tunduk pada hukum perang dan kebiasaan perang;

Selain itu, ada aspek-aspek lain seperti motif dan sebagainya, yang sering dituang dalam doktrin untuk menentukan pemberontakan yang dianggap sebagai *Belligerent* untuk mendapatkan pengakuan.

1. Terdapat tiga konsekuensi hukum diakuinya pemberontak sebagai Subjek Hukum Internasional *Belligerent*, berupa:
 - a. Kedaulatan teritorial (*territorial sovereignty*), dimana diakuinya penguasaan dan/atau kepemilikan atas suatu wilayah teritori yang diokupasi atau dikuasai oleh *Belligerent*;
 - b. Penggunaan kekerasan (*the use of force*), di mana negara dibatasi penggunaan kekerasannya, sehingga tidak semena-mena, sebab *Belligerent* memiliki hak dan kewajiban yang juga dilindungi oleh hukum internasional;
 - c. Penyelesaian sengketa (*dispute settlements*), di mana terbukanya jalur penyelesaian sengketa menggunakan segala fasilitas dan instrument hukum internasional bagi *Belligerent*.

Beralihnya subjek hukum Pemberontak untuk menjadi subjek hukum internasional, berkonsekuensi bagi kelompok-kelompok Pemberontak untuk

memiliki kapasitas dalam menjalin hubungan dengan subjek hukum internasional lain, terutama negara. Dari kapasitas status ini lah para *Belligerent* diberikan kewenangan untuk menyatakan, menegosiasikan, apa yang menjadi hak-hak-nya kepada negara. Namun kapasitas ini terbatas pada hal tersebut, dan tidak dapat diperluas pada kewenangan lain.

A. Saran

Terlepas dari tujuan dan berlangsungnya pemberontakan, keberadaan Pemberontak adalah sesuatu yang pada dasarnya tidak diinginkan oleh Negara. Sehingga, pengakuan mengenai Pemberontak sebaiknya hanya terbatas pada *Belligerent* saja yang memberontak untuk merdeka dari suatu penjajahan. Sedangkan *Belligerent* yang memberontak dari Pemerintahan yang sah perlu disepakati dan diatur dalam hukum internasional untuk hanya berkonsekuensi pada pemberian otonomi khusus atau luas dan tidak pada pemisahan diri dari negara. Hal ini karena suatu negara berkewajiban menjaga keutuhan negara dan kewibawaan Pemerintah karena itu bila ada pemberontakan sebaiknya segera diselesaikan jangan sampai meningkat menjadi besar dan luas dan menjadi perhatian masyarakat internasional.